

SKRIPSI

**PERANAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BUTON**

**JUMARNI
105730368112**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

PERAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON

Disusun dan diajukan oleh

JUMARNI
105730368112

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 1 oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : PERANAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON

Nama Mahasiswa : JUMARNI

No. Stambuk : 10573 03681 12

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS


Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

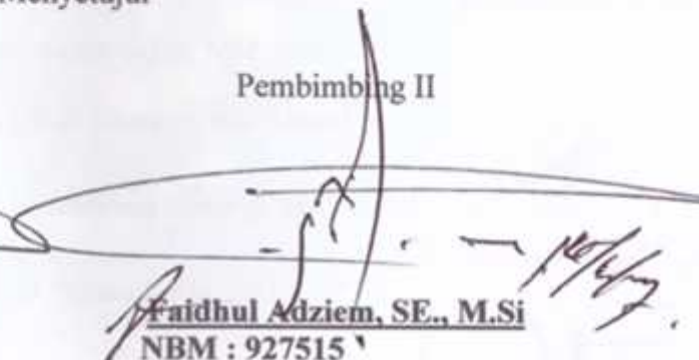
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan oleh panitia penguji skripsi Stara 1 (S1) pada hari Sabtu, 19 November 2016 pada program study Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Moh. Aris Pasigai, SE., MM
NBM : 109 3485



Faidhul Adziem, SE., M.Si
NBM : 927515

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.
NBM : 497794


Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA
NBM : 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Jumarni, Nim 10573 0368 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Nomor : Tahun 1437 H/ 2016 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari sabtu, 19 November 2016 M dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Fkonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Desember 2016

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE. MM (.....)

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA (.....)

(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)

(PD. 1 Fak. Fkonomi dan Bisnis)

4. Penguji :1. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA (.....)

2. Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)

3. Ismail Badhollahi, SE, M.Si. Ak. CA (.....)

4. Muchriana Muchran, SE, M.Si. Ak. CA (.....)

ABSTRAK

Jumarni. 2016. Peranan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Dibimbing oleh Moh Aris Pasigai dan Faidhul Adziem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dari pihak-pihak terkait. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Walaupun tidak berperan dominan, temuan penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi berperan dalam pengambilan kebijakan keuangan terkait peraturan birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa data-data yang lebih berperan dalam pengambilan kebijakan keuangan terkait peraturan birokrasi adalah peraturan pemerintahan dan pertimbangan mengenai dampak kebijakan keuangan bagi masyarakat. Namun, informasi akuntansi berperan dominan dalam pengambilan kebijakan keuangan terkait penentuan harga pelayanan publik. Biaya-biaya yang disajikan dalam laporan keuangan berperan penting dalam penentuan tarif pelayanan. Selain itu, yang juga menjadi bahan pertimbangan penentuan tarif pelayanan adalah kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan yang disediakan. Dalam perumusan kebijakan keuangan, pemerintah juga mempertimbangkan visi, misi, sasaran, dan tujuan, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengarah pada pencapaian tujuan akhir pemerintah daerah.

Kata kunci : Informasi Akuntansi, Kebijakan Keuangan, Peraturan Birokrasi, Biaya Pelayanan, Pemerintah, Tujuan Akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Peratama-tama, ucapan terimakasih peneliti berikan kepada Bapak Moh. Aris Pasigai, SE.,MM dan Pembimbing kedua Bapak Faidhul Adziem, SE,M.Si, atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan member bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terimakasih juga peneliti tujukan kepada pemerintah daerah kabupaten Buton atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di lingkungan pemerintah kabupaten Buton, utamanya untuk Badan Pendapatan Keuangan Daerah. Tak lupa pula terimakasih kepada semua pihak-pihak yang bersedia diwawancarai oleh peneliti. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya ucapan terimakasih juga peneliti berikan kepada Bapak/Ibu yang sudah memberikan dukungan atas berbagai motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Dan terimakasih pula kepada kakak Rosaldi atas semua bantuan dan motimasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Terimakasih juga peneliti berikan untuk keluarga besar peneliti yang senantiasa mendoakan kebaikan dan kelancaran dalam penyelesaian studi di kampus biru ini.

Peneliti juga berterimakasih kepada sahabat yang senantiasa mendoakan dan memotivasi peneliti dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi serta yang senantiasa mewarnai hari-hari peneliti selama menuntut ilmu di kampus biru ini.

Terakhir, ucapan terimakasih kepada pihak-pihak lainnya yang turut member sumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga semua pihak mendapatkan kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori dan Konsep.....	6
B. Tinjauan Empiris	24
C. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
B. Jenis dan Sumber Data	28
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Metode Analisis.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	33
A. Sejarah Singkat.....	33
B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah	34

C. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton.....	40
D. Gambaran Pegawai dan Anggota Personil	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan.....	57
BAB VI PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Review Wawancara	69
Lampiran 2. Hasil Wawancara Informan	70
Lampiran 4. Flowchart Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi dan Pertanggungjawaban	71
Lampiran 5. Aplikasi SIA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sangatlah diperlukan informasi-informasi yang menunjang bagi kemampuan dan kepentingan organisasi, baik organisasi sector privat maupun sektor publik. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang maupun yang akan datang”(Gordon B. Davis dalam Al-bahra bin Ladjamudin, 2013:8). Salah satu informasi yang selalu dibutuhkan oleh setiap organisasi adalah informasi akuntansi.

Akuntansi sebagai suatu sistim informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan (Weygandt *et al*, 2005:4).” Adapun bentuk dari informasi akuntansi yaitu laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Informasi dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi (Mardiasmo,

2009:31).” Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Maka seharusnya informasi akuntansi yang disediakan oleh pemerintah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan terkait perencanaan dan pengendalian keuangan daerah.

Saat ini di Indonesia, informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pengambilan keputusan dalam pemerintahan tentunya didasarkan atas informasi-informasi relevan yang diperoleh pemerintah. Begitu pula dengan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah, yang seharusnya didasarkan atas informasi akuntansi atau laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah yang bersangkutan.

Suatu keputusan tidak akan memiliki tingkat keakuratan yang baik jika tidak didukung berbagai informasi yang ada. Berbagai informasi yang diterima akan dianalisis oleh pihak manajemen untuk menghasilkan beberapa rekomendasi keputusan yang bersifat alternatif, yang salah satu diantaranya akan diambil sebagai keputusan yang terbaik.

Penyusunan laporan keuangan di pemerintahan merupakan suatu kegiatan wajib tahunan yang harus selalu dilaksanakan meskipun tidak dipungkiri bahwa hingga saat ini masih terjadi keterlambatan penyusunan

laporan keuangan di beberapa pemerintah daerah. Hal ini disebabkan adanya perubahan basis akuntansi (dari kas menjadi akrual) dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah pusat tentang pemberlakuan SAP baru yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pemerintah daerah masih menggunakan PP No. 24 tahun 2005 sebagai acuan penyusunan laporan keuangan.

Adapun laporan keuangan pokok menurut SAP terbaru terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Sementara itu, laporan keuangan pokok menurut PP No. 24 tahun 2005 yang saat ini masih digunakan oleh beberapa kabupaten di Indonesia, hanya terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut akan membantu pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan kebijakan keuangan pemerintah.

Sektor public, penelitian mengenai penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah masih sangat kurang. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah lebih banyak berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan pengelolaan dibandingkan untuk pengambilan kebijakan keuangan. Namun, telah banyak penelitian-penelitian di sektor privat yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam

pengambilan keputusan, utamanya keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di sector privat yaitu Rusmanto (2006) dan Arief (2010) yang hasilnya menunjukkan bahwa informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit.

Buton merupakan salah satu kabupaten yang baru-baru melakukan pemekaran di Sulawesi Tenggara. Proses pengembangan suatu daerah tentu saja tidak terlepas dari pengambilan kebijakan keuangan yang efektif. Kabupaten ini menjadi objek yang menarik untuk diteliti bagaimana pengambilan kebijakan keuangan dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan penelitian adalah peranan informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki praktik-praktik akuntansi agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kualitas informasi akuntansi dapat meningkat.
2. Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan (*decision maker*) dan instansi terkait lainnya dalam menyusun kebijakan keuangan daerah.
3. Sebagai sarana belajar bagi peneliti untuk menambah pengetahuan terkait kesesuaian teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik yang dilakukan.
4. Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Teori Pemaknaan (*Reception Theory*)

Teori pemaknaan adalah sebuah analisis tekstual komparatif yang berbicara tentang media dan *audience*, yang diinterpretasikan dalam konteks, bersamaan dengan sejarah dan kultural ‘konteks’ dari isi media yang lain (Jensen dan Jankowski, 2003:135). Teori pemaknaan memaparkan bahwa teks sebagai media dan pemakna sebagai *audience* adalah elemen yang saling melengkapi dalam satu area penelitian. Teori pemaknaan berarti bahwa tidak ada yang bias menjadi “pengaruh” tanpa adanya pemaknaan. Hal terpenting dari teori pemaknaan yaitu bahwa makna diciptakan dalam interaksinya antara khayalak (pembaca/pemakna) dengan teks.

Sebelumnya media hanya menjadi penyalur informasi. Kini media menjadi fasilitator, penyaring, dan pemberi makna dari sebuah informasi. Media bertugas untuk membawa *audience*-nya masuk dunia makna yang lebih luas, tidak terbatas pada tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa. Seperti halnya laporan keuangan yang merupakan media bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan keuangan yang akan diambil pemerintah. Laporan keuangan yang disajikan berfungsi sebagai pemberi makna, sementara pengguna laporan keuangan berfungsi sebagai *audience* yang merupakan penerima makna, dapat membawa *audience* dalam dunia makna yang tidak terbatas pada tempat dan waktu seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Teori pemaknaan merupakan salah satu cara standar untuk memahami *audience* media, dimana teori ini mencoba memberikan sebuah makna atas pemahaman media (cetak, elektronik, internet, dll), dengan memahami bagaimana karakter media dimaknai oleh *audience*. Individu yang menganalisis media melalui teori pemaknaan memfokuskan pada pengalaman dan pembaca (*audience*), serta bagaimana makna diciptakan melalui makna tersebut.

2. Goal Setting Theory

Goal setting adalah manajemen penetapan sasaran atau tujuan untuk keberhasilan mencapai kinerja (Davis dalam Irnawati,2004:7). Lebih lanjut dijelaskan bahwa penerapan penetapan tujuan yang efektif membutuhkan tiga langkah, yaitu menjelaskan arti dan maksud penetapan target tersebut, menetapkan target yang jelas, dan member umpan balik terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Adapun pengertian lain dari *goal setting* yaitu didasarkan pada mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (Cascio dalam Irnawati, 2004:7). Sasaran atau target bisa ditambah dengan memberi penjelasan tugas tersebut, serta mengapa sasaran atau tujuan tersebut penting dilaksanakan.

Penerapan *goal setting* terhadap sistem kinerja sangat populer dan luas penggunaannya. Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini meliputi perencanaan, pengawasan, penilaian pegawai, serta keseluruhan sistem kinerja yang ada dalam organisasi. Organisasi di pemerintahan juga memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai dan dibutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk

mencapainya. Teori *goal setting* akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan informasi akuntansi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat mendorong pemerintah untuk mencapai tujuan akhirnya.

3. Informasi Akuntansi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan saat ini atau keputusan-keputusan yang akan datang (Davis dalam Gaol, 2008:7).

Adapun pengertian akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (*Accounting principles board* dalam Halim dan Kusufi, 2012:36). Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa informasi akuntansi adalah data-data ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas, yang sudah diolah menjadi suatu bentuk data kuantitatif yang lebih berguna bagi penerima dalam pengambilan keputusan ekonomi (keuangan), baik masa sekarang atau yang akan datang. Informasi akuntansi merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas. Dalam suatu organisasi/entitas, informasi akuntansi ini berbentuk laporan keuangan yang selalu dilaporkan setiap satu periode, biasanya 1 tahun. Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan output dari suatu proses akuntansi yang disusun berdasarkan Prinsip-prinsip

Akuntansi Berterima Umum (PABU), yang nantinya digunakan sebagai alat informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PSAP No. 1, 2010).. Selain itu, laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan (Soemarsono, 2004:34).

Dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah membuat laporan keuangan untuk tujuan umum, yaitu laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pengguna laporan, termaksud lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah, atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen public lainnya seperti laporan tahunan.

a. Tujuan dan Manfaat Laporan keuangan

Laporan keuangan suatu entitas dibuat bukan tanpa suatu tujuan tertentu. Sesuai dengan PSAP No.1 (2010), secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pelaporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai posisi keuangan, serta arus kas. Dalam pemerintahan, tujuan

umum dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Laporan keuangan pemerintah juga memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara rinci tujuan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Meyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept No.4* (SFAC 4) dalam Mardiasmo (2009:167), tujuan dan manfaat laporan keuangan organisasi nirlaba adalah sebagai berikut.

- 1) Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- 2) Memberiakan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis, serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
- 3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa laporan keuangan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, menilai kinerja manajemen suatu entitas pelaporan, dan juga menjadi salah satu bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu entitas pelaporan.

b. Pengguna Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan sector publik diklasifikasikan dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, yang terdiri dari lembaga

pemerintah (*governing bodies*), investor dan kreditor, pemberi sumber daya (*resource providers*), badan penagawas (*oversight bodies*), serta konstituen (Anthony dalam Mardiasmo, 2009:168).

Pada dasarnya masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengenai (*right to know*) yang terdiri dari mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu (Mardiasmo, 2009:171. Setiap pemakai laporan keuangan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Berikut merupakan kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang dipaparkan oleh Mardiasmo (2009:172).

- 1) Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- 2) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang mereka bayarkan kepada pemerintah.
- 3) Kreditor dan investor membutuhkan laporan keuangan untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
- 4) Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang biasa atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan Negara.

5) Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen system informasi manajemen (SIM) untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja organisasi.

c. Komponen Laporan Keuangan

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non-finansial. Laporan keuangan sektor publik tidak dapat disamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya, karena organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan non-moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik.

Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Sebagaimana diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan pokok terdiri dari komponen berikut.

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyediakan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode

pelaporan. LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya harus mencantumkan pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, dan ekuitas dana.

3) Laporan Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus dimas yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan:

a) Aktivitas operasi

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai

aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b) Aktivitas investasi aset nonkeuangan

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

c) Aktivitas pembiayaan

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan deficit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

d) Aktivitas nonanggaran

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang.

4) Catatan atas laporan keuangan

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyediakan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistimatis. Setiap pos dalam pelaporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan

arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Pengertian Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Definisi pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut.

“pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan DPRD menurut asas desentralisasi, dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari: unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang diwadahi dalam sekretariat; unsure pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat; unsure perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan; unsure pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik, yang diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut memiliki hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

6. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan (*decision making*) memiliki berbagai pengertian. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada (Terry dalam Hasan dan Arief, 2010:8). Pendapat lain tentang pengambilan keputusan, yaitu keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi (Fahmi, 2011:2). Rekomendasi inilah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begtu besarnya

pengaruh yang akan terjadijika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidak hati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah.

Pembuatan keputusan adalah bagian kunci manajer. Kegiatan ini memainkan peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat manajer. Dalam proses perencanaan, manajer memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan. Seluruh proses perencanaan itu melibatkan manajer dalam serangkaian situasi pembuatan keputusan. Kualitas keputusan-keputusan manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun.

a. Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara-cara pemecahan masalah memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pangkal dari permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional (Hasan dalam Arief, 2010:10). Pengambilan keputusan juga berfungsi sebagai suatu yang bersifat futuristic, artinya berhubungan dengan hari esok atau masa yang akan datang, dimana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama.

b. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan ada bermacam-macam, tergantung dengan keadaan/permasalahannya. Menurut Terry dalam Hasan (2004) dalam Arief (2010:10), disebutkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut.

1) Intuisi

Pengambilan keputusan yang berdasar atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan. Beberapa kebaikan dari pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yaitu waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relative lebih pendek. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi akan memberikan kepuasan pada umumnya.

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi juga memiliki kelemahan, antara lain keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik dan sulit mencari alat pembandingnya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi seringkali mengabaikan dasar-dasar pengambilan keputusan yang lainnya.

2) Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Seseorang yang berpengalaman dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung

ruginya, serta baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Terkadang berdasarkan pengalaman seseorang, suatu masalah dapat diduga cara penyelesaiannya walaupun dengan hanya dengan melihat sepintas saja.

3) Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada.

4) Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, antara lain kebanyakan penerima keputusan adalah bawahan, terlepas apakah penerima keputusan tersebut menerima secara sukarela ataukah secara terpaksa. Keputusan berdasarkan wewenang juga dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun kelemahan pengambilan keputusan yang berdasarkan wewenang, yaitu dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktik dictatorial, serta sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan.

5) Rasional

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, serta konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal penting untuk dipertimbangkan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternative, preferensi yang jelas, dan hasil maksimal.

c. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan merupakan salah satu hasil dari suatu pengambilan keputusan. Kebijakan keuangan pemerintah didasari atas suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik dengan melihat laporan keuangan, maupun aspek-aspek ekonomi, social, dan politik. Mengatakan bahwa kebijakan keuangan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan strategi yang telah dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran (Hanafi dan Mugroho, 2009:1).

Salah satu bentuk kebijakan keuangan di Indonesia antara lain berupa peraturan pemerintah yang terkait keuangan, baik yang dituangkan dalam undang-undang maupun yang dituangkan dalam keputusan menteri. Kebijakan yang tercantum dalam peraturan pemerintah maupun keputusan menteri

keuangan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan oleh para pengambil keputusan (*decision makers*).

Pengambilan kebijakan keuangan daerah, hal-hal yang menjadi dasar pengambilan kebijakan tentu terdiri dari beragam macam informasi, tidak hanya informasi akuntansi namun juga dibutuhkan informasi politik, sosial, dan informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan urusan daerah . kebijakan keuangan daerah juga biasanya diatur dalam peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah ini biasanya disusun sesuai dengan potensi daerah. Kebijakan keuangan disetiap daerah memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini disebabkan setiap pembangunan daerah pasti disertai dengan perencanaan keuangan yanga tepat.

d. Perencanaan dan Pengendalian

Akuntansi manajemen sektor public utamanya berperan dalam penyediaan informasi akuntansi yang kemudian digunakan oleh manajer publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi, termaksud pula di dalamnya pengendalian keuangan (Mardiasmo, 2009:31). Perencanaan adalah “cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional menurut (Mardiasmo, 2009:33).” Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis atau prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang.

Untuk menjamin bahwa strategi dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang baik. Setiap organisasi memiliki pola pengendalian yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Alat pengendalian sector publik lebih banyak berupa peraturan birokrasi karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar.” Hal ini dikarenakan informasi akuntansi bersifat kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan.

Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari sebuah koin, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut (*follow-up*) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding.

Dalam proses perumusan dan penentuannya, perencanaan dan pengendalian suatu organisasi membutuhkan berbagai informasi, salah satunya yaitu informasi akuntansi (laporan keuangan). Dilihat dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, seharusnya informasi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk penentuan perencanaan dan pengendalian keuangan suatu daerah.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi tinjauan empiris dari penelitian ini merupakan penelitian di organisasi sektor privat. Peneliti memaparkan penelitian sector privat disebabkan masih kurangnya penelitian mengenai pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Penelitian di sektor privat berikut menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan berperan penting bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan/kebijakan, utamanya yaitu kebijakan keuangan.

Rusmanto (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap Penggunaannya Dalam Pengambilan Keputusan Kredit Bank Umum di Banjarmasin” memberikan hasil bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan, utamanya laporan keuangan yang berkualitas, memiliki peranan penting dalam suatu pengambilan keputusan.\

Dewi dan Mukhyi (2009) melalui penelitian berjudul “pengaruh Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengambilan Keputusan Oleh Investor” menunjukkan hasil bahwa semakin lengkap laporan keuangan yang disajikan perusahaan maka akan lebih meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan laporan tahunan

perusahaan merupakan salah satu sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief (2010) mengenai peran laporan keuangan dan intuisi dalam pengambilan keputusan kredit (studi empiris pada perbankan kota Semarang) menunjukkan hasil bahwa informasi akuntansi berupa laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit. Organisasi yang memiliki informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang lebih baik dan lengkap akan memberikan informasi yang lengkap untuk pertimbangan pengambilan keputusan kredit yang lebih kuat dan lebih baik.

C. Kerangka Pikir

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan penyusunan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Salah satu tujuan umum pelaporan keuangan pada unit pemerintah, yaitu untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). Laporan keuangan yang disajikan diharapkan tidak hanya menjadi media penyalur informasi, tetapi juga menjadi fasilitator, penyaring, dan pemberi makna bagi penggunaannya, utamanya pemerintah dalam memaknai laporan keuangan untuk perumusan kebijakan keuangan demi pencapaian tujuan akhir pemerintahan yang bersangkutan.

Untuk bisa menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara

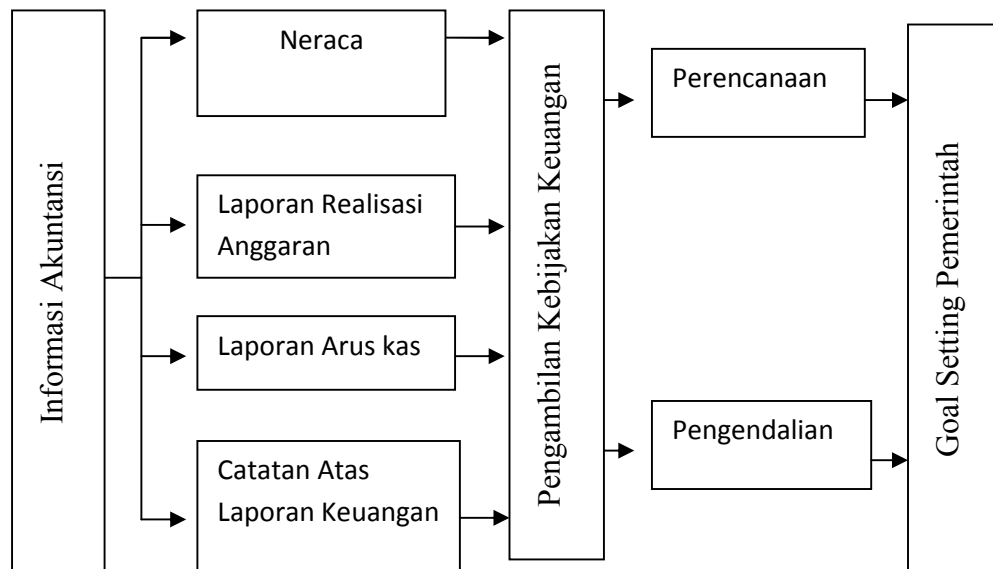
terpisah. Sementara itu, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) juga menyusun laporan keuangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pada saat akan disusun laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan SKPD dan SKPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat pemerintah daerah. Format laporan keuangan SKPKD sama seperti laporan keuangan SKPD, yang berbeda hanyalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya.

Saat ini telah ada standar akuntansi pemerintahan yang terbaru, yaitu berbasis akrual, yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Terdapat 7 (tujuh) laporan keuangan ini menurut standar ini, yaitu laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), catatan atas laporan keuangan (CaLK), laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE). Namun peneliti menggunakan komponen laporan keuangan menurut PP No. 24 tahun 2005 sebagai acuan dalam penelitian ini. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penerapan PP No. 71 tahun 2010 ini masih belum merata hingga ke pelosok negeri. Masih ada beberapa kabupaten yang belum menerapkan peraturan ini disebabkan kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) daerah serta kurangnya pula sosialisasi dari pemerintah pusat tentang peraturan baru tersebut, yang menganut perubahan basis kas menjadi basis akrual.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan periode tertentu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang mendukung pencapaian sasaran/tujuan akhir pemerintah. Kebijakan

keuangan yang dilakukan pemerintah tentu saja berkaitan dengan suatu kegiatan perencanaan dan pengendalian atas keuangan daerah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai peran informasi akuntansi, yaitu berupa laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) dalam pengambilan kebijakan keuangan yang terkait perencanaan dan pengendalian keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (SKPD/SKPKD). Kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi dari suatu penelitian sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban data yang diperoleh. Oleh karena itu, lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) kabupaten Buton, yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan April-Juli 2016.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data primer ini akan diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan keuangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang akan diperoleh dari sumber lain di luar responden. Data sekunder ini, yaitu akan berupa arsip dan dokumen-dokumen pemerintah yang terkait dengan kebijakan keuangan daerah.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mengumpulkan data yang *valid*. Ada 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data yang dipaparkan oleh Sugiono (2010:225), yaitu sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi (Nasution dalam Sugiyono, 2010:226), selain itu ada pula Marshall (1995) dalam Sugiyono (2010:226) yang menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Tempat dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Buton. Adapun pelaku yaitu para pengambil keputusan, yaitu kepala daerah, pimpinan SKPD, serta pimpinan SKPKD, sementara itu, aktivitas yang menjadi objek yaitu pengambilan kebijakan keuangan, yang seharusnya didasarkan atas lapiran keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) atau yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) atau yang memberi jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2006:135). Esterberg (2002)

dalam Sugiyono (2010:233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi akan yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Adapun wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010:240). Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Metode dokumentasi juga merupakan pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Seperti halnya meneliti dokumentasi kebijakan keuangan yang dibuat oleh pemerintah, dalam kaitannya dengan perenan informasi akuntansi.

D. Metode Analisis

Analisis data sebagai “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:244).” Namun dalam kenyataannya, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dokumen peraturan mengenai kebijakan keuangan pemerintah, komentar peneliti, catatan lapangan, maka akan dilakukan analisis data menggunakan paradig interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu.

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010:246), yaitu sebagai berikut.

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data”kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Sajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Kesimpulan data (*verifikasi data*), berarti data yang telah disimpulkan masih harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan model data yang disajikan setelah direduksi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat

Terbentuknya Badan pendapatan Daerah kabupaten Buton, berdasarkan UU No 70 Drt 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Buton. Yang pelaksanaanya diatur dalam pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaga Negara Tahun 19974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037). Kemudian digantikan berdasarkan UU No 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II yang dilanjutkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah. Yang berpedoman kepada UU Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pokok-pokok kepegawaian diatur di dalam UU Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 50 Tahun 2000, Tentang pedoman Susunan Orgnisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Buton, Pengintegrasian Instansi Vertikal menjadi Perangkat Daerah dan Penggabungan Instansi/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Buton berdasarkan keputusan Bupati Nomor

061/75/K/2001, dan disempurnakan dengan Keputusan Bupati Buton Nomor 188.343/62/K/2001, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Buton. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Buton masih ingin terus memperbaiki semua Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah guna memajukan Kabupaten Buton dan menambah Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kabupaten Buton. Maka pada Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor 061.1/843/2008 tentang Uraian Tugas Jabatan structural Kabupaten Buton, dibentuklah/diubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton.

B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasidalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki.

Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi,

koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertical maupun horizontal. Organisasi yang dimaksud untuk membina keharmonisan kerja, agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Sehingga rencana kerjadapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Dengan berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor 061.1/843/ 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelola
 - c. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan Internal
3. Badan Pengelola Keuangan Membawahi:
 - a. Sub Bidang Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pembayaran
4. Bidang Pengelolaan Asset dan Akutansi membawahi :
 - a. Sub Bidang Akutansi;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Asset; dan
 - c. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
5. Bidang Penetapan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi.

- b. Sub Bidang Penetapan dan Penghitungan PAD; dan
- c. Sub Bidang Penghitungan Bagi Hasil.

Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton. Adapun uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
- c. Melaksanakan koordinator pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- e. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- f. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Melaksanakan tugas ketatausahaan Badan.
- h. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan pimpinan dan pelayanan umum.
- b. Melaksanakan administrasi surat-menyurat.
- c. Menyusun kebutuhan atas peralatan kerja dan perlengkapan kantor.
- d. Melaksanakan fungsi administrasi, kepegawaian.

- e. Melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
- f. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian internal.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , mempunyai tugas :
 - 1) Mengelola surat masuk dan surat keluar.
 - 2) Merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - 3) Melaksanakan pemeliharaan alat-alat kantor dan barang inventaris.
 - 4) Melaksanakan pemesanan karcis, blanko, dan formulir pajak/retribusi.
 - 5) Menjaga dan memelihara lingkungan kerja kantor.
 - 6) Melaksanakan pencatatan dan membuat laporan kehadiran pegawai.
 - 7) Membuat Daftar Urut Kepangkatan.
 - 8) Merencanakan kebutuhan pendidikan dan latihan terhadap pegawai.
 - 9) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
 - 2) Membuat pertanggungjawaban pengeluaran keuangan.
 - 3) Membuat Laporan Keuangan atas penggunaan dana.
 - 4) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah.
- c. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan Internal, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan perencanaan pemantauan kegiatan.
 - b. Menyusun analisa, evaluasi dan laporan terhadap hasil kinerja.
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah.
 - d. Mengevaluasi terhadap keberhasilan sistem dan mekanisme.

3. Bidang Pengelola Keuangan

Kepala Bidang Pengelola Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b. Meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- c. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bidang Pengelola Keuangan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Anggaran, mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - 2) Menyusun Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan anggaran.
 - 3) Meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD.
 - 4) Menyiapkan dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - 5) Mengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- b. Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Belanja Daerah, mempunyai tugas:

- 1) Meneliti kelengkapan permohonan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh setiap SKPD.
- 2) Mencatat dan membukukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang telah diterbitkan.
- 3) Meneliti Daftar Pembayaran Gaji pada setiap SKPD.
- 4) Menyusun statistic keuangan.

4. Bidang Pengelolaan Asset dan Akuntansi

Kepala Bidang Pengelola Asset dan Akuntansi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan prosedur akuntansi asset meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasai/digunakan setiap SKPD.
- b. Menyelenggarakan pembukuan atas pendapatan dan pengeluaran Daerah.
- c. Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada setiap SKPD.
- d. Menyusun Neraca Daerah.
- e. Menyusun bahan Perhitungan APBD.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bidang Pengelola Asset dan Akuntansi dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Akuntansi, mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan pembukuan atas pendapatan dan pengeluaran daerah.

- 2) Memeriksa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada setiap SKPD.
 - 3) Mempersiapkan penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
 - 4) Mempersiapkan laporan neraca daerah.
 - 5) Mempersiapkan bahan penyusunan Perhitungan APBD.
- b. Sub Bidang Pengelolaan Asset, mempunyai tugas :
- 1) Menghimpun data, meneliti dan menilai barang-barang milik daerah
 - 2) Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang daerah.
 - 3) Menganalisa kebutuhan peralatan/barang daerah.
 - 4) Melaksanakan pembukuan atas benda berharga.
 - 5) Memeriksa tungkul pemakaian benda berharga.
 - 6) Mengelola Sistem Informasi Barang Daerah.
- c. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah.
 - 2) Membuat laporan perkembangan pendapatan dan pengeluaran daerah.
 - 3) Menyusun laporan evaluasi pendapatan dan pengeluaran daerah.

C. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton

1. Visi BPKD:

Menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Lembaga yang Amanah dalam Pelayanan Publik

2. Misi BPKD:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
- c. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah

D. Gambaran Pegawai dan Anggota Personil

Gambaran pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten

Buton terdiri dari 73 orang staf pegawai antara lain:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1 orang
2	Sekretaris	16 orang
3	Bidang Pengelola keuangan	23 orang
4	Bidang Pengelola Asset akuntansi	9 orang
5	Bidang Pendapatan dan Penetapan	5 orang
6	Bidang Penagihan dan Penertiban	8 orang
7	Tenaga Harian Lepas	11 orang

Sumber: BPKD Kabupaten Buton Tahun 2016

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasikan data akuntansi menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi.

Jadi, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengubah data akuntansi menjadi informasi yang berguna dalam penentuan keputusan oleh manajemen daerah, mulai dari pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data hingga menjadi informasi yang kemudian didistribusikan kepada para pengguna informasi tersebut.

Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini menerapkan basis akrual.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2013 mendefinisikan kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagai prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi daerah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan pelaporan pada pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah, laporan keuangan

Bendahara daerah (BD), dan laporan keuangan tiap bagian dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan.

2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi daerah.
3. Keterkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi, Laporan Keuangan, dan Bagan Akun Standar

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Atas dasar Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) tersebut, ditambah dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAS), serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah yang terkait dengan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, maka disusunlah kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, diperlukan suatu sistem akuntansi yang merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.

Adapun komponen laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan akuntansi mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas
 - 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) Dapat diverifikasi;
 - 5) Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 6) Mencakup semua hal yang material.
3. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya;

4. Dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. Dalam melakukan pertimbangan tersebut pemerintah memperhatikan:

- a) Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah yang konsisten dengan huruf a dan b.

5. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

d. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

e. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

2. Siklus Keuangan Daerah

a. Unit Anggaran bersama dengan Unit Bina Pendapatan Daerah, melakukan penyusunan anggaran dengan melihat masukan baik berupa data keuangan tahun sebelumnya (Laporan Perhitungan Anggaran,

Neraca, Aliran Kas, dan Nota Perhitungan) maupun berupa usulan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) dari masing-masing Satuan Kerja.

- b. Penyusunan anggaran oleh Unit Keuangan menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang selanjutnya akan diserahkan ke Panitia Anggaran yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Pengawasan Daerah, Unit-unit Keuangan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, Unit Bina Program, Satuan Kerja yang bersangkutan, dan Satuan Kerja terkait untuk ditelaah.
- c. RAPBD yang telah ditelaah oleh Panitia anggaran selanjutnya dibahas oleh Panitia Anggaran dengan DPRD. DPRD lebih lanjut menyetujui RAPBD menjadi APBD dan menyerahkannya ke Unit Anggaran dan Unit Pendapatan Daerah.
- d. Sesudah Pemerintah Daerah mensahkan APBD menjadi Perda APBD, Unit Anggaran akan membuat OKA sesudah melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja yang terkait. OKA-OKA tersebut diserahkan oleh Unit Anggaran ke Satuan Kerja yang terkait. Disamping itu Unit Anggaran juga menyerahkan APBD dan OKA ke Kas Daerah, Unit perbendaharaan dan Unit Pembukuan.
- e. Berdasarkan OKA yang diterima, Satuan Kerja mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk realisasi belanja dan Surat Tanda Setoran (STS) untuk penyetoran pendapatan ke Unit Perbendaharaan.

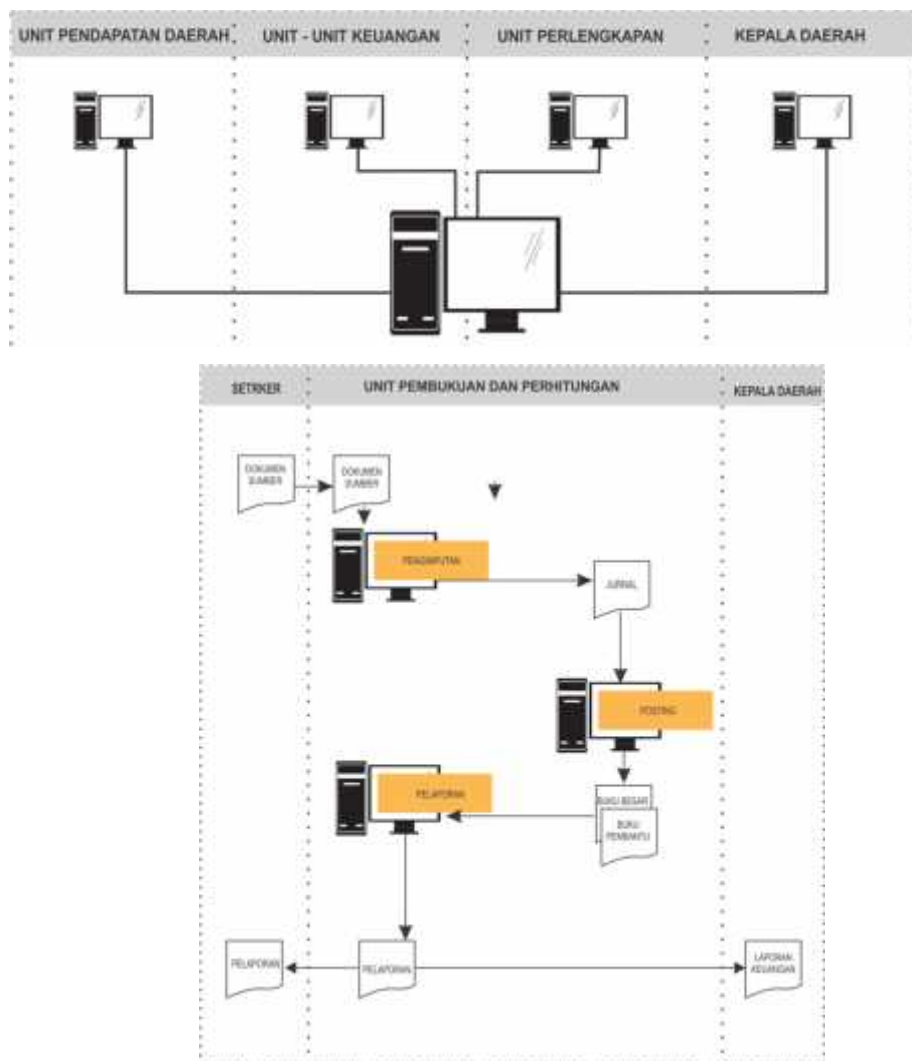
- f. Unit Perbendaharaan menerima SPP dan melakukan penelitian SPP tersebut dengan OKA, Lembar Kerja maupun Petunjuk Operasional yang ada di Unit Perbendaharaan dan selanjutnya menerbitkan Surat Pemerintah Membayar, Unit perbendaharaan juga mensahkan STS yang diserahkan oleh Satuan Kerja dengan mencap STS tersebut. SPM tersebut diserahkan oleh Unit Perbendaharaan ke Kas daerah dan Unit Pembukuan.
- g. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan belanja operasional, belanja modal, dan penerimaan pendapatan daerah, Kas Daerah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja berdasarkan SPM dan STS yang telah disahkan oleh Unit Perbendaharaan. Pelaksanaan kegiatan ini dicatat dalam Buku Besar Kas Umum.
- h. Anggaran dan Realisasi APBD secara keseluruhan akan dibukukan secara computerized oleh Unit Pembukuan dan hasilnya dalam bentuk Buku Besar Pengeluaran. Pada akhir periode anggaran, sistem akuntansi berbasis komputer ini menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Aliran Kas.
- i. Unit Perhitungan selanjutnya melakukan perhitungan anggaran yang akan menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota Perhitungan sebagai wujud Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah pada khususnya dan akuntabilitas publik pada umumnya.

- j. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diatas akan menjadi umpan balik dalam penyusunan anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Berikut kerangka umum sistem informasi akuntansi keuangan daerah

Gambar 1. Kerangka Umum Sitem Informasi Akuntansi Daerah



Adapun kerangka umum satuan informasi akuntansi keuangan daerah yaitu:

1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus diposting kedalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan Kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen, satu copy untuk arsip Unit Perhitungan. nLPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.

Adapun siklus keuangan daerah (proses kebijakan daerah sesuai dengan SOP yaitu:

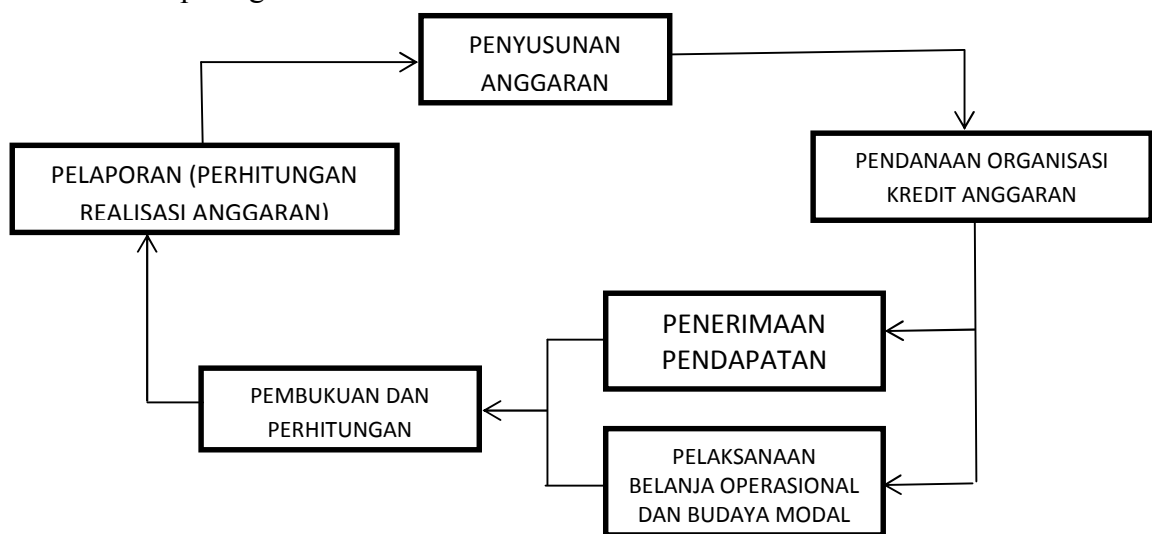
1. Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun

lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD.

2. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran (OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan OKA, LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.
3. Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan SPM. STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan pendapatan dan belanja.
4. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik. Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.
5. Unit Perhitungam Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran) disampaikan ke pada Kepala Daerah.

6. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan Pertanggungjawaban

Berikut mekanisme jalur proses kebijakan daerah sesuai dengan SOP diuraikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Siklus Keuangan Daerah Kabupaten Buton

2. Peran Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan proses pengolahan data akuntansi secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan kebijakan keuangan. Sistem Informasi Akuntansi juga berperan penting dalam pembuatan keputusan mengenai evaluasi kerja. Dalam hal ini Sistem Informasi Akuntansi berperan dalam menyediakan informasi menyangkut aspek financial.

Karena Sistem Informasi Akuntansi bagi pihak instansi/perusahaan dalam pengambil keputusan memiliki peran yang sangat penting maka

pengolahan semua informasi akuntansi harus ditangani secara cermat, baik dan tepat waktu dalam satu kerangka sistem yang unggul sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat dengan pertimbangan yang matang dalam perkembangan instansi/perusahaan kedepannya.

Adapun data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen pemerintah daerah yang menyangkut kebijakan keuangan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dan valid, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak dinas BPKD yang terlibat dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah.

Informasi akuntansi merupakan informasi yang idealnya selalu ada pada suatu organisasi. Hasil wawancara menunjukkan semua responden menuturkan pendapat yang relative hampir sama mengenai informasi akuntansi, bahwa informasi akuntansi adalah informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Salah satu responden, Drs. Asimu yang menjabat sebagai Kepala Badan BPKD, berpendapat bahwa:

“Informasi akuntansi merupakan informasi yang sangat krusial bagi pemerintah. Beliau mengatakan bahwa informasi akuntansi ini sangat krusial karena setiap program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah harus didukung dengan kemampuan financial daerah yang disajikan dalam laporan keuangan. Jika terjadi kesalahan dalam informasi akuntansi, bukan tidak mungkin suatu program kerja pemerintah tidak dapat dijalankan”

Responden lainnya, Wa Ode Sitti Raymuna, SE, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Buton, berpendapat bahwa:

“Informasi akuntansi adalah informasi yang berisi data-data keuangan. Data-data keuangan ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini menunjukkan aktivitas ekonomi suatu organisasi kalau skala organisasi. Kalau daerah, berarti aktivitas ekonomi daerah. Kalau di pemerintahan, laporan keuangan yang sering disajikan adalah laporan realisasi anggaran dan neraca. Informasi akuntansi sangat penting karena merupakan bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.”

Ada pula kepala bidang pendataan dan penetapan badan BPKD Kabupaten Buton, yaitu Safiuddin, S.Pd., M.Pd, yang menuturkan bahwa:

“Melalui informasi akuntansi kita dapat mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah didanai secara efektif atau belum. Beliau menyatakan bahwa informasi akuntansi ini menyajikan banyak aktivitas keuangan dan utamanya digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Terlihat jelas dari penuturan para responden yang diwawancarai bahwa informasi akuntansi keuangan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik untuk bukti pertanggungjawaban, maupun untuk perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang.

Informasi akuntansi yang digunakan Kabupaten Buton ini, sudah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh pendapat salah satu responden, yaitu Muhammad Ammin, yang menyatakan bahwa:

“Hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengenai penyajian informasi akuntansi pemerintah daerah kabupaten Buton ini yaitu telah menetapkan standar akuntansi pemerintah secara penuh. Jika informasi akuntansi di daerah ini telah disajikan dengan baik, maka seharusnya informasi akuntansi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan keuangan daerah”.

Informasi akuntansi disajikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan

organisasi dapat tercapai. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo bahwa peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan andal kepada manajer sektor publik, untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi (2009:33), maka peneliti membagi dua hasil penelitian ini, yaitu peranan informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan terkait fungsi pengendalian dan peranan informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan terkait fungsi perencanaan.

Untuk produk dari Sistem Informasi Akuntansi tersebut adalah informasi akuntansi keuangan. Untuk mengolah data menjadi informasi pihak instansi/perusahaan mengambil kebijaksanaan untuk menggunakan computer sebagai alat bantu. Data yang diperoleh dari transaksi instansi/perusahaan diolah dan diproses sehingga menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi/perusahaan.

Untuk menyusun rencana dan anggaran instansi/perusahaan, informasi akuntansi memegang peranan penting, agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan perencanaan yang matang dan pengendalian yang efektif. Agar dapat berperan secara efektif dalam kegiatan pengambilan keputusan maka informasi akuntansi harus dikelola dengan baik, cepat, akurat dan terpadu.

Sistem pengolahan informasi pada dasarnya tidak sekedar melakukan pengolahan transaksi yang ada pada sebuah instansi/perusahaan, tetapi juga harus memberi dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen

dan pengambilan keputusan. Pada setiap kegiatan instansi/perusahaan sistem informasi akuntansi merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan proses pengolahan data akuntansi secara efisien sehingga menghasilkan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Kabupaten Buton juga bertumpu pada sistem informasi akuntansi yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Instansi ini menghasilkan informasi akuntansi berasal dari bagian akuntansi. Bagian Dinas Pertanian dan mengolah data-data yang masuk dan output untuk dijadikan informasi yang kemudian akan diberikan kepada pihak internal maupun eksternal untuk pengawasan pelaksanaan anggaran.

Informasi itu dapat berupa laporan rincian biaya ataupun laporan realisasi anggaran dan dengan laporan-laporan inilah pihak instansi dapat mengambil keputusan untuk mengendalikan biaya/anggaran. Untuk menyusun anggaran instansi/perusahaan, informasi akuntansi memegang peranan penting, agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan perencanaan yang matang dan pengendalian yang efektif. Agar dapat berperan secara efektif dalam kegiatan pengambilan keputusan maka informasi akuntansi harus dikelola dengan baik, cepat, akurat dan terpadu.

Dalam hal ini, pihak instansi dapat menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak

yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan serta membuat perencanaan dan bahan pertimbangan untuk realisasi anggaran kedepannya.

Dalam sistem pengolahan informasi pada dasarnya tidak sekedar melakukan pengolahan transaksi yang ada pada sebuah instansi/perusahaan, tetapi juga harus memberi dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusan.

B. Pembahasan

Informasi akuntansi memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah yang terkait perencanaan tarif pelayanan publik dan belum berperang dominan dalam pengambilan kebijakan keuangan terkait pengendalian, yaitu menyangkut peraturan birokrasi. Hal ini disebabkan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman dalam pemanfaatan informasi akuntansi.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buton bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. (KSAP IAI, 2010, Lampiran PP Nomor 71 Tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah : 8)

Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas(Cash Flow) dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah

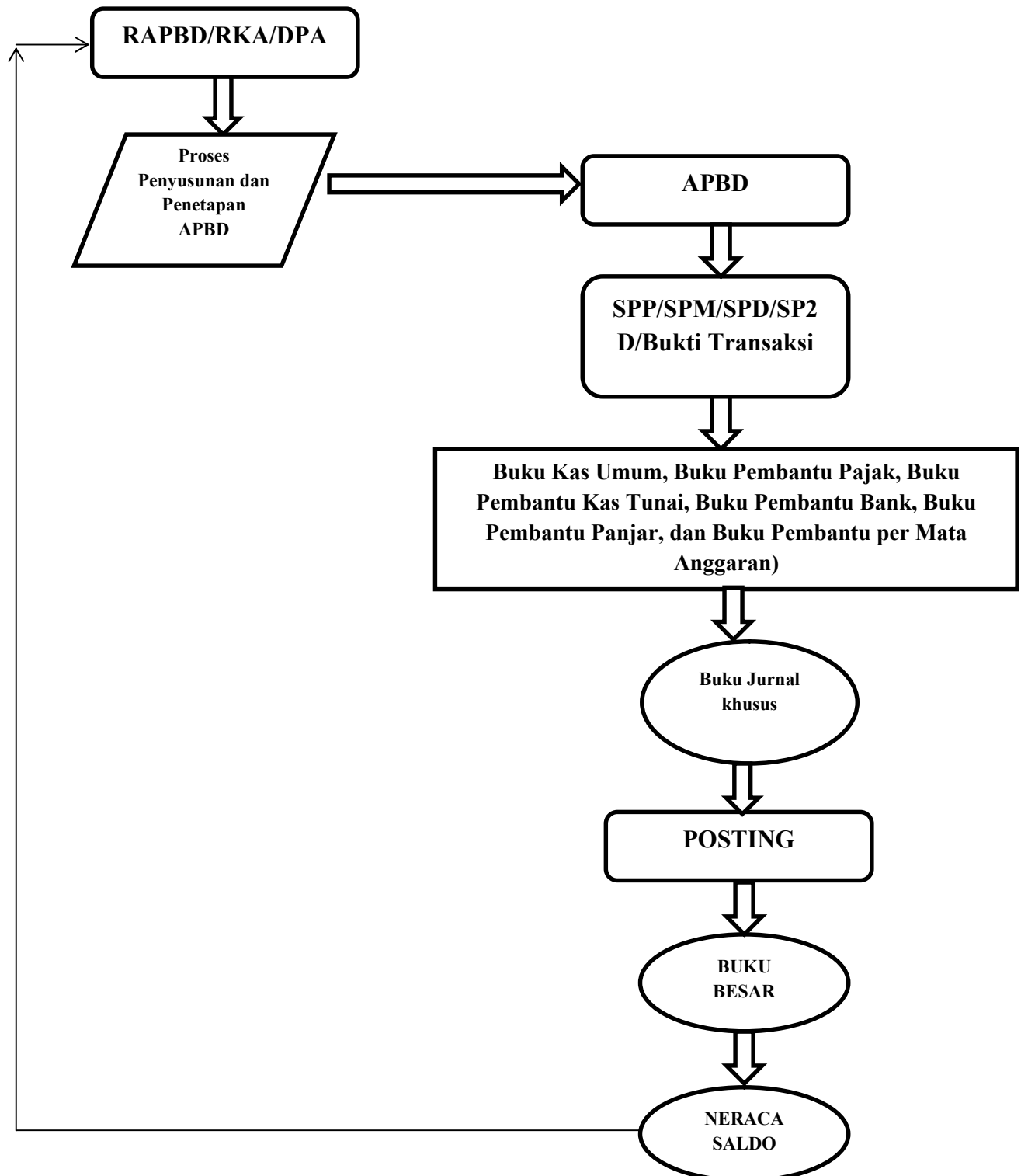
Nomor 71 Tahun 2010 menjadi berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan financial yang terdiri dari Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan LAK (Laporan Arus Kas), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Sebagaimana disebutkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 1 yang merupakan lampiran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010” Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
- e. Evaluasi Kinerja

Adapun proses Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Buton secara sederhana digambarkan sebagai berikut:



Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 1, 2010 :6).

Karakteristik kualitatif Informasi akuntansi keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

- a. Relevan;

- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

Laporan informasi akuntansi keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Informasi akuntansi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, 2010 : 12).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data-data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa informasi akuntansi berperan dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buton. Informasi akuntansi memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakna keuangan pemerintah yang terkait perencanaan tariff pelayanan publik dan belum berperang dominan dalam pengambilan kebijakan keuangan terkait pengendalian, yaitu menyangkut peraturan birokrasi. Hal ini disebabkan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman dalam pemanfaatan informasi akuntansi.

Jenis laporan keuangan yang paling sering digunakan dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah di kabupaten Buton adalah Laporan Realisasi anggaran. Dalam kaitannya dengan *Goal Setting Theory* di mana pemerintah seharusnya mengambil kebijakan keuangan yang dapat mendorong pencapaian visi dan misi, dapat disimpulkam pula bahwa pemerintah kabupaten Buton senantiasa mempertimbangkan manfaat suatu kebijakan keuangan terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah lebih sering pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) terkait informai akuntansi.
2. Pemerintah mengadakan sosialisasi di instansi-instansi pemerintah mengenai pentingnya informasi akuntansi dalam pembilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Anandita. 2010. Peran Laporan Keuangan dan Intuisi Dalam Pengambilan Keputusan Kredit. *Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Dewi, Kumala dan M. Abdul Mukhyi. 2009. Pengaruh Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengambilan Keputusan oleh Investor. *Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*. Depok.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Pengambilan Keputusan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Gaol, Jimmy. 2008. *Sistem Informasi Manajemen (Pemahaman dan Aplikasi)*. Jakarta: Grasindo.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuanagn Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Iman dan Tri Laksono mugroho. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan daerah di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya press.
- Hasan, M. Iqbal. 2004. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irnawati. 2004. Peranan Goal Setting Dalam Upaya Meningkatkan produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Jensen, Klaus and Nicholas Jankowski. 2002. *A Handbook Of Qualitative Methodologiest For Mass Communication Research*. New York: Routledge.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kaukus. 2012. *Kebijakan Keuangan*. <http://kaukustujuhbelas.org/baca/137351/Kebijakan-Keuangan.html?lang=id>
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yokyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Ilexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusmanto. 2006. *Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap Penggunaannya Dalam Pengambilan Keputusan Kredit Bank Umum di Banjarmasin*. Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional. Banjarmasin.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soemarsono. 2004. *Revisi Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Review Wawancara

Review Wawancara tentang Peranan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan
Kebijakan Keuangan Pemerintah Kab. Buton.

Responden

1. Nama Responden :
2. Jabatan :

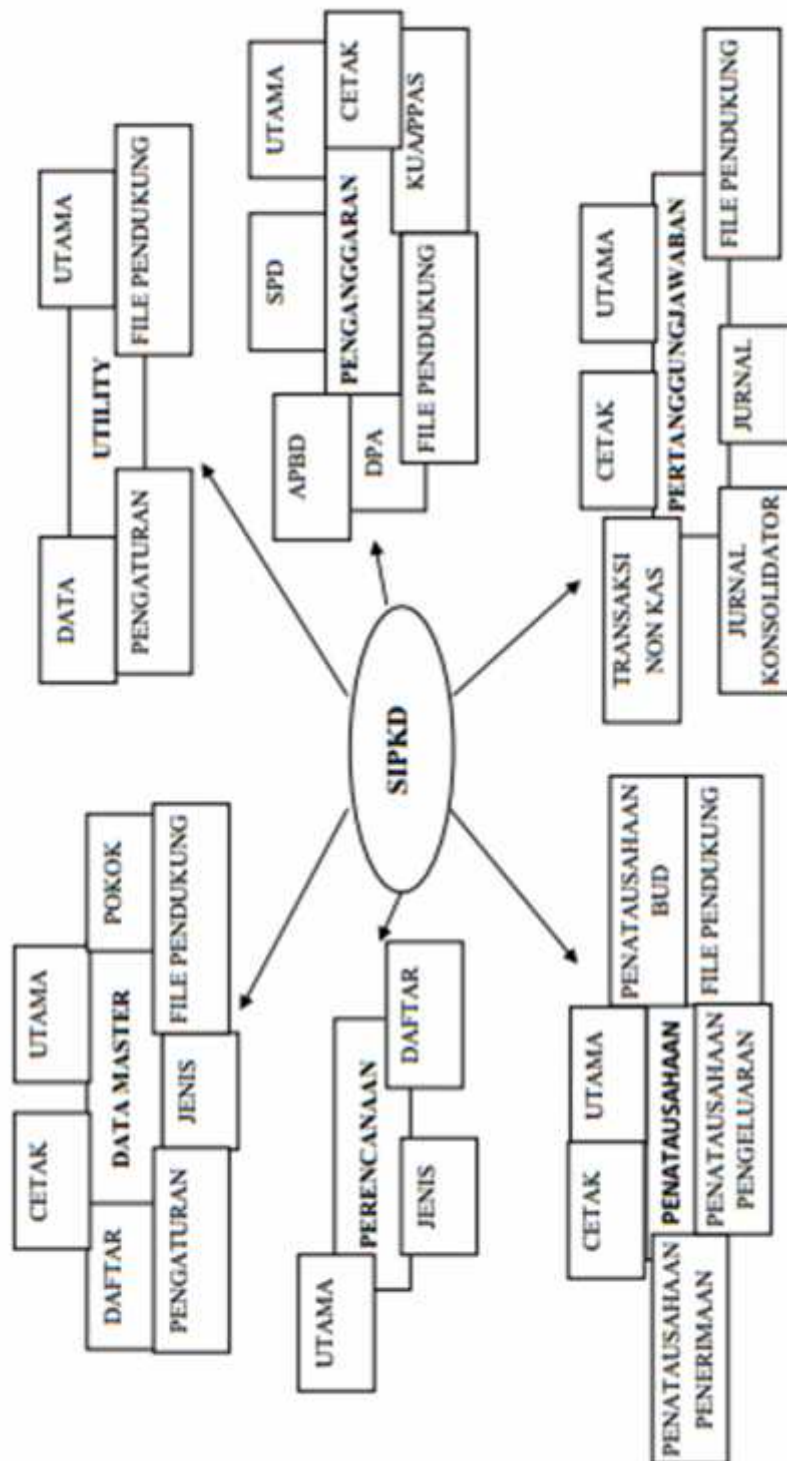
No	Pertanyaan	Realisasi		Ket.
		Ya	tidak	
1	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai informasi akuntansi?			
2	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kebijakan keuangan?			
3	Kebijakan apa saja yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten buton?			
4	Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan kebijakan keuangan di kabupaten Buton?			
5	Data-data apa saja yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan keuangan?			
6	Bagaimana proses pengambilan kebijakan keuangan hingga akhirnya disahkan menjadi Perda (peraturan Daerah)?			

Lampiran 2. Hasil Wawancara Informan

No	Hasil Wawancara
1	Informasi akuntansi merupakan informasi yang sangat krusial bagi pemerintah
2	Informasi akuntansi adalah informasi yang berisi data-data keuangan. Data-data keuangan ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini menunjukkan aktivitas ekonomi suatu organisasi kalau skala organisasi. Kalau daerah, berarti aktivitas ekonomi daerah. Kalau di pemerintahan, laporan keuangan yang sering disajikan adalah laporan realisasi anggaran dan neraca. Informasi akuntansi sangat penting karena merupakan bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
3	Informasi akuntansi ini menyajikan banyak aktivitas keuangan dan utamanya digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
4	Hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengenai penyajian informasi akuntansi pemerintah daerah kabupaten Buton ini yaitu telah menetapkan standar akuntansi pemerintah secara penuh
5	Melalui informasi akuntansi kita dapat mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah didanai secara efektif atau belum. Beliau menyatakan bahwa informasi akuntansi ini menyajikan banyak aktivitas keuangan dan utamanya digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
6	Hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengenai penyajian informasi akuntansi pemerintah daerah kabupaten Buton ini yaitu telah menetapkan standar akuntansi pemerintah secara penuh. Jika informasi akuntansi di daerah ini telah disajikan dengan baik, maka seharusnya informasi akuntansi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan keuangan daerah

Lampiran 3. Flowchart Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi dan
Pertanggungjawaban

Lampiran 4. Aplikasi SIA



Bagan Kerja BPKD

